

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN KEBANGKITAN MILITER JEPANG

Oleh:

Ayu Kartika  
Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
ayu.kartika.2010@fisipol.umy.ac.id

---

**ABSTRAK** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dasar Negara Jepang mulai meningkatkan kembali kekuatan militernya pasca kekalahan Perang Dunia II serta mengetahui faktor apa saja yang mendorong negara Jepang sehingga negara tersebut berambisi menormalisasikan militernya. Jangkauan penelitian dilakukan dengan rentan waktu agar kajian ini bisa lebih terfokus. Dengan alasan tersebut, penulis dapat menetapkan batasan waktu yaitu pergeseran arah politik Jepang terkait pengembangan sistem pertahanannya sejak era Shinso Abe menjadi Perdana Menteri tahun 2006-2016. Penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka, Penulisan data menggunakan metode *library research*, yaitu diperoleh dari sumber-sumber lain berupa buku-buku atau literatur, surat kabar, majalah, maupun data-data yang bersumber dari internet.

*Kata Kunci* : Jepang, militer, Kebijakan, normalisasi

---

Dasar konstitusi pertahanan pemerintahan Jepang pasca perang Dunia II adalah UU pasifis yang dirancang untuk menggantikan Konstitusi Meiji. Kekalahan Jepang atas Perang Dunia II mengharuskan bahwa Jepang tidak boleh memiliki kekuatan militer, hal tersebut tertera dalam artikel 9 konstitusi Jepang yang disusun pada 3 Mei 1947 di bawah pendudukan Amerika Serikat atas Jepang pasca Perang Dunia II. Hal tersebut membuat Jepang selalu berada di bawah payung politik dan militer Amerika Serikat.

Di bawah permukaan yang tenang, debat keras melanda Jepang berkenaan dengan masa depannya. Masa lalu Jepang masih mempengaruhi kehidupan masyarakat dinegara ini. Masyarakat terpecah menjadi dua pemikiran, yang setuju dan optimis bahwa Jepang harus mulai bangkit dalam kemandirianya bernegara, dan disalah satu sisi masyarakat yang masih trauma dengan apa yang pernah dialami Jepang sehingga mereka masih percaya bahwa lebih baik berada dibawah payung militer

AS. Namun *status quo* dengan jelas menunjukkan bahwa Jepang mulai kewalahan dalam menyikapi perkembangan dunia yang semakin dinamis dan kompleks.

Menjelang akhir abad XX Jepang terlihat lebih berani berpartisipasi menunjukkan eksistensi serta kekuatan angkatan pertahanannya. Keseriusan pemerintah Jepang untuk membangun kembali sistem pertahanannya juga ditunjukkan dengan beberapa sikap seperti pembangunan perangkat pertahanan, pengendalian ekspor, serta kerjasama di bidang nuklir. Shinso Abe juga berencana untuk menghidupkan reaktor nuklir serta pemerintah Jepang telah menyetujui legislasi pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Di mana saat ini Dewan Keamanan Nasional sedang bertugas dalam mengumpulkan informasi keamanan dan mempercepat proses pengambilan keputusan mengenai hal tersebut.

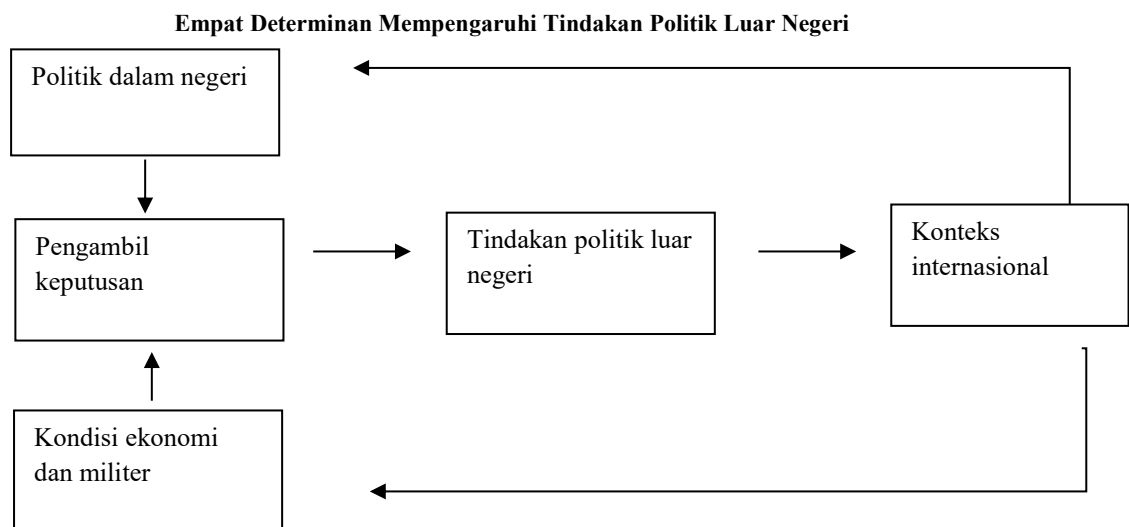
### **TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Ada sejumlah ide dari beberapa tingkat analisis tentang peran politik dalam negeri, dalam penyusunan politik luar negeri. William D. Coplin mencoba menjawab asumsi yang didasarkan bahwa politik dibuat oleh orang-orang yang memegang peran dalam pengambilan keputusan politik adalah suatu hal tindakan yang tidak dapat dilakukan sembarangan. Akan tetapi kebijakan politik luar negeri tertentu dapat dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi (politik dalam negeri, politik luar negeri, kondisi ekonomi militer, dan konteks internasional) yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem.

Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsederasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi

ekonomi dan militer negara tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapinya). (Coplin, 2003: 170)

Proses pengambilan keputusan Luar Negeri (Coplin, 2003: 170)



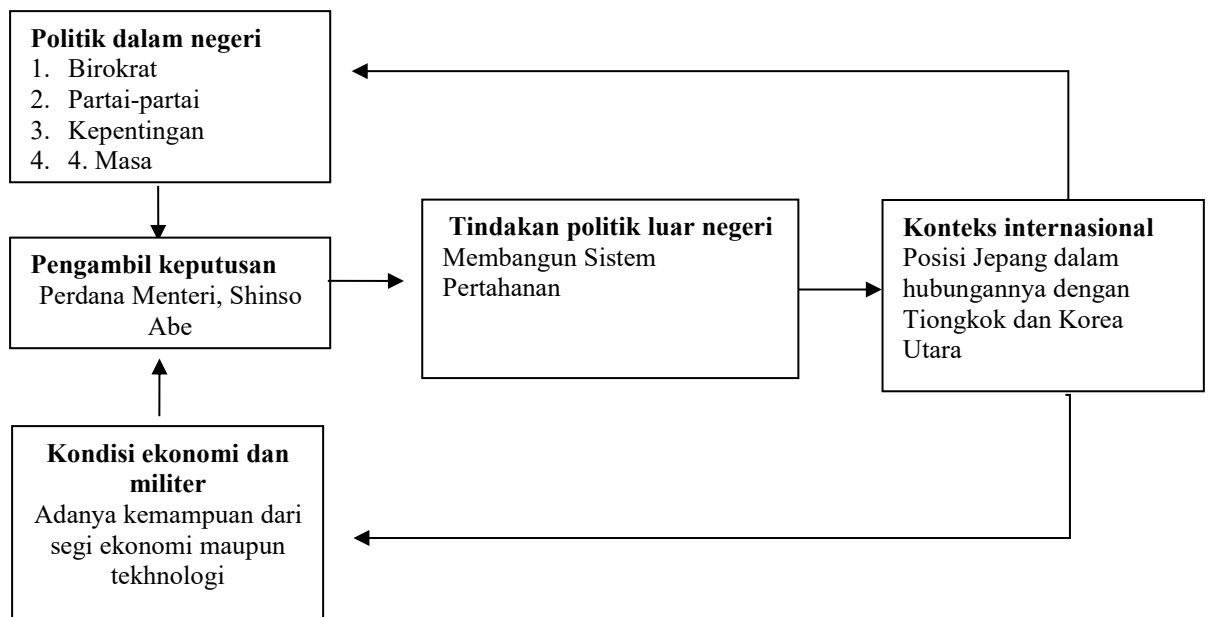
Sumber: William D. Coplin, *PENGANTAR POLITIK INTERNASIONAL Suatu Telaah Teoritis*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo) 2003, Hal. 170.

Dengan kata lain pengambilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal satu negara dan faktor eksternal yang mempengaruhi suatu negara mengambil sebuah kebijakan yang diilustrasikan pada bagan di atas.(Coplin, 2003: 30)

Telah disinggung penulis di atas bahwa kebijakan yang dibuat Jepang merupakan kebijakan dalam negeri yang ditujukan sebagai alat penyusun politik luar negeri, yaitu kebijakan yang merubah garis besar kebijakan politik dalam negeri Jepang yaitu mengenai pertahanan Jepang sebagai bentuk bagaimana

Jepang mengupayakan tujuan politik luar negerinya, dengan kata lain kebijakan Jepang dalam membangkitkan kembali sistem pertahanannya dapat dianalisis melalui dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut William D. Coplin yaitu dipengaruhi faktor internal dan eksternal yaitu faktor politik domestik dan konteks internasional yang diuraikan sebagai berikut:

Aplikasi Gambar Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri William D. Coplin



Sumber: William D. Coplin, *PENGANTAR POLITIK INTERNASIONAL Suatu Telaah Teoritis*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo) 2003, Hal. 30.

## **PERAN *Liberal Democratic Party* (LDP) DAN SHINZO ABE DALAM PENINGKATAN MILITER JEPANG**

Menurut teori William D. Coplin kondisi domestik memiliki pengaruh dalam menentukan output kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk budaya dan sistem politik yang berjalan beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya. *Domestic Politics* (situasi politik dalam negeri) termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik masnusiannya. Selain itu, pembuatan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi politik dalam negeri yang tengah dihadapi. Dimana banyak analis politik internasional berargumentasi bahwa

konsekuensi yang mempersatukan dari krisis eksternal sering menyebabkan para pengambil keputusan politik luar negeri, yang dihadapkan pada instabilitas di dalam negeri, menjadi agresif di luar negeri. (Coplin, 2003: 30)

Teori ini menyebutkan bahwa dalam kaitannya terhadap politik luar negeri, politik dalam negeri berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri.

Kerangka konseptual yang digunakan berfokus pada hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka. Aktor-aktor politik tersebut disebut dengan "*policy influencers*" (yang mempengaruhi kebijakan). Dengan memandang peran politik dalam negeri dalam penyusunan politik luar negeri sebagai interaksi antara *policy influencer*, yang akan menjelaskan proses politik dalam negeri yang menghasilkan politik luar negeri. Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri tersebut dengan para pengambil keputusan politik luar negeri disebut "*policy influences system*" (sistem pengaruh kebijakan). Dengan memandang peran politik dalam negeri, dalam penyusunan politik luar negeri sebagai interaksi antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*.

Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang sudah mengambil peran penting dalam hal mengambil keputusan perihal keamanan Jepang. Sejak dimulainya Perang Dingin dalam tatanan dunia bipolar LDP yang berkuasa pada saat itu memilih menyelaraskan perihal keamanan negaranya di bawah naungan AS dan menekankan pada pemulihan ekonomi. Tahun 2012 LDP mendapatkan kembali kekuasaan dengan diangkatnya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri. LDP didukung AS dalam *containment policy* terhadap Cina. Pada tahun 2010 Cina melampaui perekonomian Jepang sebagai negara dengan perekonomian terpesat kedua di dunia, selanjutnya Cina juga menunjukkan peningkatan agresifitas dalam klaim teritorial maritim Laut Cina Timur dan Selatan. Hak tersebut tidak hanya

mengancam negara tetangganya melainkan hegemoni AS di Asia-Pasifik pun terancam.

Kemenangan LDP ini dapat dilihat sebagai indikasi kembali lahirnya nasionalisme Jepang. Rasa nasionalisme ini menandai momentum kebangkitan Jepang setelah selama dua dekade mengalami stagnasi ekonomi serta politik negaranya. Pertama, PM Noda dianggap gagal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti persoalan ekonomi nuklir Fukushima dan pemulihan pasca tsunami. Kepemimpinan Partai Demokrat Jepang (DPJ) juga lemah dalam menangani isu-isu persengketaan kawasan dengan Tiongkok dan Korea Utara. PM Noda dianggap lembek dan lamban dalam merespon provokasi dua negara tersebut. Kedua, di sisi lain, Shinzo Abe bak magnet bagi para pemilih Jepang khususnya kawula mudanya. Janjinya membawa Jepang lebih asertif dengan usulan radikal menguatkan kemampuan militer Jepang.

LDP termasuk Abe di dalamnya merupakan tokoh berpaham neokonservatif yang memiliki peran penting dalam kubu tersebut yang mulai menyebarkan rasa nasionalis terutama terhadap kalangan masyarakat. Kubu neokonservatif menginginkan kemandirian dengan kesetaraan, pergerakan mereka adalah mendorong revisi konstitusi, sikap proaktif di bidang internasional, kebangkitan sentimen nasionalistik, serta kebijakan garis keras terhadap Cina dan Korea Utara. (Arase, 2007: 560-568)

Mentalitas Abe sebagai generasi muda yang tidak ingin melihat Jepang selalu dipersalahkan dalam perang dunia. Bagi Abe dan Koizumi menyadari bahwa mereka mewarisi kebijakan luar negeri yang pasif. Jepang mempunyai peran yang sangat minim dalam penataan keamanan internasional akibat munculnya kekhawatiran masyarakat internasional akan kembali munculnya militerisme Jepang. Setelah setengah abad Jepang tunduk pada tatanan internasional yang menyudutkan Jepang, dan kini tak perlu lagi Jepang dikaitkan dengan kesalahan perang saat Perang Dunia II.

Beberapa bulan menjabat Shinzo Abe mengumumkan berdirinya Kementerian Pertahanan (*Ministry of Defense*) dengan menaikkan status Badan

Pertahanan tanggal 9 Januari 2006. Keputusan ini mengejutkan masyarakat internasional mengingat ini adalah pertama kalinya Jepang mempunyai kementerian pertahanan setelah Perang Dunia. Bahkan Abe segera menyusun rencana untuk segera melengkapi lembaga pertahannya dengan merencanakan membentuk dua badan lagi yakni Badan Intelijen Negara dan Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*).

### **Kapabilitas Militer Penunjang Sektor Ekonomi Jepang**

Faktor ekonomi dan militer, sangat mempengaruhi kemampuan diplomasi suatu negara, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan dalam pertahanan dan keamanan. Faktor ekonomi dan militer memainkan penting dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri karena berpengaruh terhadap kekuatan menekan yang harus dimiliki dalam hubungan luar negerinya. Negara-negara yang mempunyai kemampuan ekonomi dan militer yang kuat dipastikan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam hubungannya dengan negara lain.

Negara Jepang jika ditinjau dari point ini memiliki faktor potensial yang kuat dalam bidang ekonomi untuk menunjang kapabilitas militernya. Menurut William D. Coplin, kemampuan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan melihat GNP-nya (*Gross National Product*), yaitu semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun. Selain GNP, indikator ekonomi lainnya adalah GNP perkapita atau pendapatan perkapita serta dengan melihat potensi pertumbuhan ekonomi tersebut. (Coplin, 2003: 151)

Jadi dapat di asumsikan bahwa, semakin besar GNP negara tersebut maka semakin makmur dan kayalah negara tersebut. Ada pun dalam hal militer, terdapat dua kondisi terhadap kekuatan militer suatu negara.

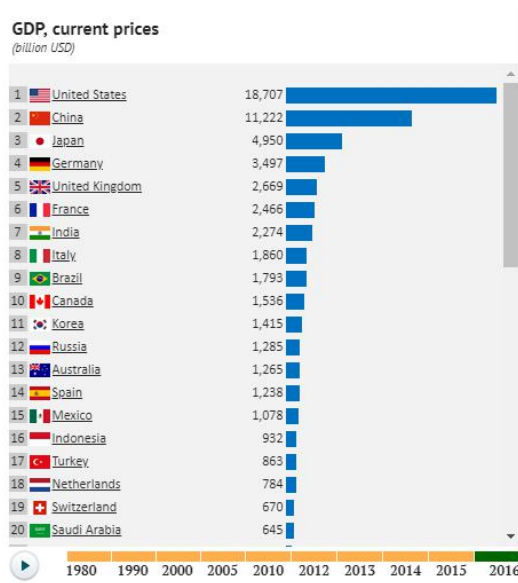
Negara Jepang diakui sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi besar di kawasan maupun dikancah internasional. Namun, kondisi ekonomi yang tergolong kuat ini mempunyai perilaku yang cukup berbeda dengan negara ekonomi maju lainnya terutama perih kebijakan keamanan dan militer.

Keadaan pasal 9 sampai saat ini masih menjadi pembatas bagi Jepang dalam melakukan ekspansi militernya walaupun secara kondisi ekonomi negara sangat mampu menunjang peningkatan serta ekspansi militer. Pada tahun 1976, Perdana Menteri terdahulu Miki Takeo mengumumkan pembelanjaan pertahanan harus dijaga dibawah 1% dari produk domestik bruto (PDB) Jepang. Batas yang terus diamati hingga 1986. Pada tahun 2005, anggaran militer Jepang dijaga di sekitar 3% anggaran nasional; sekitar setengahnya dihabiskan untuk biaya personil, dan sisanya untuk program pengembangan senjata, pemeliharaan dan biaya operasional. Pada tahun 2014, Jepang berada di 10 besar daftar anggaran pertahanan terbesar di dunia berdasarkan pengeluaran, dengan pengeluaran sekitar 1% dari PDB.

Pada tahun 2016 negara Jepang menduduki peringkat 10 besar negara dengan pembiayaan militer yang menduduki peringkat ke 8 hanya dengan 2,7% ekspenditur militer. Dan terbesar kedua di Asia setelah Cina yang menduduki peringkat kedua dengan total ekspenditur 13%.

Pembelanjaan militer tersebut hanya 2,7% yg digunakan dari anggaran belanja militer negara yang diajukan sebesar 5,2%. Meskipun persentase yang kecil namun pada tahun 2016 nominal yang terealisasikan cukup besar mengingat pada tahun tersebut Jepang menempati posisi ketiga GDP terbesar di dunia.

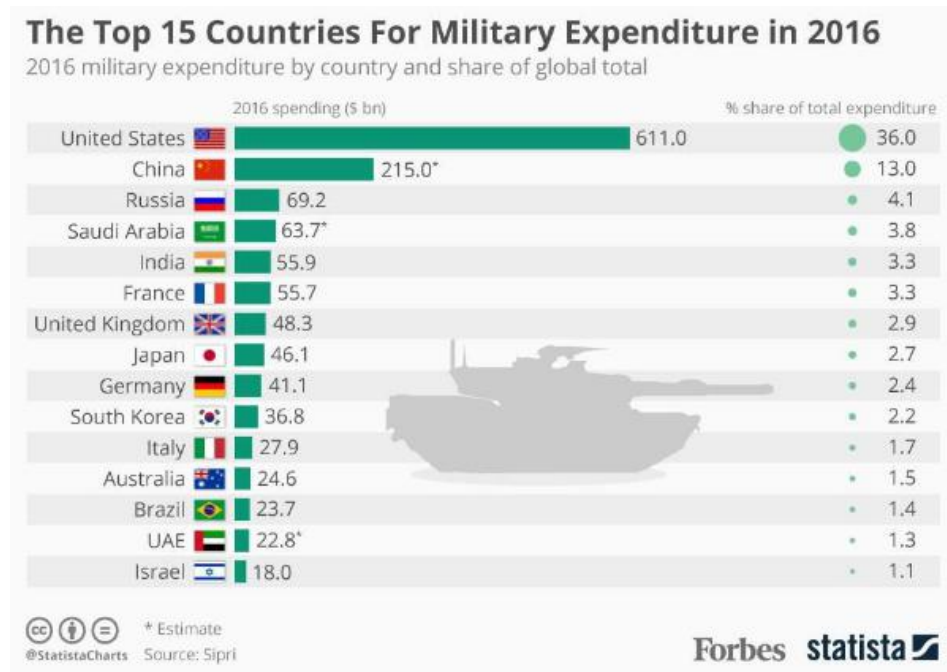
### Peringkat GDP Terbesar di Dunia 2016





Sumber : <https://knoema.com/tlcnrcg/gdp-by-country-world-largest-economies-2016>

### Top Military Expenditure in 2016



Sumber : Sipiri

Dalam upaya meningkatkan ekonomi dan militernya Jepang memfokuskan perhatiannya pada dua negara yaitu Cina dan Rusia. Negara-negara ini sedang bersaing secara kompetitif dalam membangun kekuatan militernya dengan memperebutkan sumber daya dan kompetisi terbuka dalam bidang ekonomi. Cina saat ini menjadi negara yang sangat berpengaruh baik secara politik, ekonomi dan militer. Komunitas internasional telah mengakui keberadaan Cina sebagai pemain utama di kawasan dengan partisipasi aktif nya dalam sektor keamanan non tradisional. Namun hal yang menjadi kekhawatiran negara sekitarnya adalah peningkatan kemampuan militer dan modernisasi alutsista dalam tempo yang sangat cepat dan meluas, didukung dengan tingginya dan peningkatan anggaran belanja pertahanan secara konstan, kondisi ini berjalan tanpa adanya kejelasan status dan visi militer yang dituju dari modernisasi militer Cina.

Jepang ingin meredam kebangkitan Cina yang ditandai oleh kebangkitan militer dan pengaruh perekonomiannya di Asia Tenggara. Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari perjanjian pasifis yang disebut Pasal 9. Shinzo Abe sebagai pemimpin Liberal Democratic Party berupaya melakukan kampanye di kalangan politik dan masyarakat Jepang bahwa Jepang perlu membangun kekuatan pertahanan yang memadai untuk menghadapi perubahan kondisi keamanan di Kawasan. Upaya tersebut membuahkan hasil dan pada tanggal 1 Juli 2014 Kabinet Jepang meratifikasi re-interpretasi Pasal 9.

### **Faktor Konteks Internasional**

Faktor ketiga adalah konteks internasional, yang berupa situasi internasional dimana suatu negara melaksanakan politik luar negerinya yang ditujukan dalam mempengaruhi negara-negara lain. Hubungan politik dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan politik suatu negara. Konteks Internasional memiliki peranan penting dalam menentukan politik luar negeri. Konteks internasional akan memungkinkan kita untuk menentukan politik luar negeri suatu negara hanya secara parsial, karena harus didukung dengan menelaah proses-proses politik luar negeri negara tersebut.(Coplin, 2003: 168)

Dalam memahami kasus politik luar negeri, masalah awal yang harus lebih dahulu di jelaskan adalah unsur kepentingan nasional dan kekuatan nasional suatu negara yang bersangkutan. Dengan kata lain dapat dianggap bahwa politik luar negeri adalah penyeimbangan atau pemenuhan selisih antara kuantitas dan kualitas kepentingan nasional dan kekuatan nasional.(Tulus: 2006: 13)

Konteks internasional dalam jurnal ini akan dibawa pada posisi khusus negara Jepang dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional. Dalam hal ini konteks politik internasional memainkan politik luar negeri yang penting. Seiring dengan meningkatnya konflik dan kekuatan antara Jepang dan kedua tetangganya Tiongkok dan Korea Utara yang semakin memanas. Selain itu

hubungan politik luar dengan negara-negara lain dalam lingkungannya sangat berperan dalam keputusan-keputusan luar negeri suatu negara.

Kebijakan Jepang dalam meningkatkan kapabilitas militernya tidak dapat terelakan dari faktor eksternal yaitu faktor konteks internasional yang mendorong Jepang mentransformasikan sistem pertahanan dan kemanannya. Meningkatnya suhu politik di Asia Timur, khususnya Asia Timur Laut (*Northeast Asia*) sangat mengawatirkan pihak Jepang yang akan merasa sangat terancam kedaulatannya jika tidak memiliki kemampuan sistem pertahanan yang mandiri.

Faktor tersebut datang dari negara tetangga Tiongkok dan Korea Utara, serta persetujuan AS yang mendukung Jepang mentransformasikan sistem pertahanan dan keamanannya menjadi sistem pertahanan dan keamanan negara normal pada umumnya (normalisasi). Dari sisi Tiongkok yang mengalami perkembangan sangat cepat secara ekonomi serta ekonomi ini juga diproyeksikan untuk membiayai modernisasi pertahanan dan militernya yang meningkat pesat. Posisi Jepang yang merasa terancam karena terhimpit dua negara komunis yang memiliki relasi kuat terlebih dalam hal peningkatan kapabilitas militernya yaitu Tiongkok dan Korea Utara, memicu Jepang sebagai negara berdaulat untuk mempertahankan negaranya dari *security dilemma* antara Jepang, Tiongkok, dan Korea Utara.

Anggaran pertahanan Tiongkok mengalami peningkatan nominal yang cukup pesat setiap tahunnya, dipantau selama 15 tahun terakhir dari tahun 2000, anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah Tiongkok adalah 14,6 miliar juta, tahun 2001, 17 miliar dollar lebih besar dibandingkan Korea Selatan dan Taiwan. Kenaikan anggaran pertahanan Tiongkok pada tahun 2001 dikarenakan konflik yang terjadi di Kosovo dan situasi dunia saat itu. Tahun 2002, anggaran yang dialokasikan sejumlah 20 miliar dollar dan tahun 2003 naik menjadi 22 miliar dollar. Di tahun 2004 anggaran pertahanan Tiongkok naik terus meningkat sebesar 2,6 miliar dollar menjadi 24,6 miliar dollar, meskipun pada tahun 2004 Tiongkok mengalami defisit sebesar 38,7 miliar dollar akibat dari pengeluaran persenjataan yang melebihi anggaran yang telah ditentukan. Tahun 2005 anggaran pertahanan Tiongkok naik sebesar 12 persen atau sekitar 29,9

milliar dollar dan tahun 2006 naik sebesar 15 persen atau sekitar 35 miliar dollar. Tahun 2007 meningkat menjadi 45 miliar dollar dan maret 2008 pemerintah Tiongkok secara resmi mengumumkan kenaikan anggaran pertahanannya menjadi 57, 22 miliar dollar.

Peningkatan anggaran belanja militer Tiongkok pada tahun 2015 dibuktikan dengan posisi Tiongkok yang menempati rangking kedua setelah Amerika Serikat dalam pembelanjaan perangkat militer di tahun 2015 yang mencapai 13% dari seluruh persentase belanja militer dunia di bawah Amerika Serikat 36%. Peningkatan anggaran militer Tiongkok setiap tahunnya menunjukkan sebuah indikasi bahwa Tiongkok sedang berusaha untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Timur, bahkan untuk bersaing dengan negara-negara Barat seperti Amerika dan Rusia.

Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur yang menaruh *concern* terhadap atas pengembangan kekuatan militer Tiongkok yang dianggap sebagai “musuh besar” di kawasan selain Korea Utara. Melihat pengembangan kekuatan militer Tiongkok yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang sangat signifikan mendorong Jepang mau tidak mau menaikkan anggaran pertahanan dan keamanannya sebagai efek dari *security dilemma*.

## **KESIMPULAN**

Adapun yang mendasari Jepang dalam perubahan kebijakan meningkatkan kapabilitas sistem pertahanannya, sesuai pada analisis kerangka dasar teori yang dikemukakan oleh penulis, bahwa kebijakan yang dilakukan Jepang merupakan sebuah kebijakan dalam negeri yang ditujukan sebagai alat penyusun politik luar negeri, berdasarkan pada konsep teori pengambilan keputusan luar negeri William D. Coplin yang mengungkapkan mengenai militer dan pertahanan sebagai bentuk bagaimana Jepang mengupayakan tujuan politik luar negeri dengan membangkitkan kembali sistem pertahanan yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yakni pada faktor pengambil keputusan, militer dan ekonomi, serta konteks internasional. Teori tersebut didukung oleh konsep *security dilemma* yang mengemukakan bahwa negara yang hidup di dalam

sebuah sistem yang anarki harus memperhatikan masalah keamanannya, baik dari serangan ataupun dominasi negara lain. Oleh karena itu, negara tersebut akan berusaha meningkatkan kekuatannya agar bisa terhindar dari ancaman kekuatan negara lain. Ketiga faktor tersebut menunjukkan *security dilemma* yang saat ini sedang dihadapi oleh Jepang.

Faktor pengambil keputusan yaitu sosok *policy influence* Perdana Menteri Shinzo Abe, di mana ia merupakan ujung tombak kebangkitan pertahanan Jepang, memulai perubahan fundamental dalam orientasi kebijakan pertahanan Jepang, dari mulai merubah status Badan Pertahanan menjadi Dewan Keamanan pada Januari 2006. Serta reaksi Shinzo Abe terhadap permasalahan keamanan khususnya terhadap perkembangan militer Tiongkok dan Korea Utara yang semakin aktif, hal ini dapat dilihat dari *National Defense Program Guidelines*, serta *Japan White Paper* yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang.

Faktor ekonomi dan militer merupakan kebutuhan Jepang dalam menunjang sektor ekonominya untuk era ini sudah membutuhkan dukungan keamanan yang mumpuni. Karena mayoritas sektor perekonomian Jepang merupakan perekonomian internasional yang berinteraksi dan membutuhkan sumber daya alam ataupun energy dari negara lain dalam menjalankan perekonomiannya, dimana terdapat persaingan antar negara untuk menjaga agar sektor ekonomi ini tetap berjalan seperti keamanan energy dan keamanan perjalanan ekspor maupun impor, keamanan geografis, perebutan sumber daya alam, dan sebagainya dimana Jepang membutuhkan pertahanan dan keamanan untuk menjaga hal tersebut tetap pada kendali Jepang.

Faktor yang terakhir adalah faktor konteks internasional yaitu dimana Jepang mulai mendapatkan tekanan dan ancaman keamanan dari negara-negara tetangga terutama negara kawasan khususnya Tiongkok dan Korea Utara. Ancaman tersebut dirasa merupakan ancaman yang nyata untuk kedaulatan Jepang mulai dari persengetaan wilayah di Laut Cina Selatan, persaingan teknologi militer yang diikuti persaingan hegemoni khususnya di Asia Timur, serta ancaman misil dan rudal serta pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Selain itu keinginan serta adanya dukungan dari negara adidaya AS untuk

mewujudkan Jepang menjadi negara normal yang mempunyai kemandirian pertahanan dan keamanan negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Coplin, William D. (2003). *Pengantar Poilitik Internasional Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

### ARTIKEL DALAM JURNAL

Arase, David. 2007. *Japan, the Active State?: Security Policy after 9/1*. Dalam *Jurnal Asian Survey*

**Victor Muhamad, Simela. 2009.** “*Pengembangan Kekuatan Militer Cina dan Dampaknya Terhadap Kawasan Asia Timur*”. P3DI. Vol.14. No.3

### SKRIPSI

Rahmi, Rulia . 2006. “*Kinerja Perusahaan Asing Di Indonesia*”, HI FISIPOL UMY, Yogyakarta,

### SITUS RESMI

<https://knoema.com/tlcnrcg/gdp-by-country-world-largest-economies-2016>

SIPRI Fact Sheet. Trends In World Military Expenditure, 2016. Stockholm International Peace Research Institute.

<https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-world-military-expenditure-2016.pdf>

<http://www.globalsecurity.org/military/world/China/budget.htm>